

Ambiguitas Diplomatik dan Ketahanan Maritim Indonesia: Analisis Geopolitik Pernyataan Bersama Prabowo-Xi Jinping dalam Konteks Laut Cina Selatan

Sahisnu Wanditadiva

Association of Top Achiever Scouts (ATAS) Indonesia

*Korespondensi email: divasahisnu@gmail.com

Dikirim:14-7-2025 .Direvisi:15-08-2025, Diterima: 24-08-2025

ABSTRACT

The Joint Statement issued by President Prabowo Subianto and President Xi Jinping in November 2024 sparked controversy due to the use of the phrase “joint development in areas of overlapping claims,” which is seen as opening space for interpretations that could disadvantage Indonesia. This article aims to explore how such diplomatic ambiguity affects Indonesia’s geopolitics and maritime resilience. This research uses a qualitative-descriptive approach with data collection through literature studies of official narratives, policy documents, and strategic literature, which are then analyzed thematically based on theoretical frameworks. The findings suggest that diplomatic ambiguity weakens Indonesia’s defense posture, creates inter-agency disconnects, and erodes Indonesia’s credibility as a middle power in the Indo-Pacific region. Moreover, this ambiguity increases the risk of narrative exploitation by dominant actors such as China, limiting Indonesia’s strategic room to maneuver. These dynamics highlight the need for greater clarity and consistency in Indonesia’s foreign policy narrative, especially on sensitive issues like the North Natuna Sea, to strengthen national resilience in a sustainable and comprehensive way.

Keywords: *Diplomatic Ambiguity; Geopolitics, Maritime Resilience; South China Sea; Middle Power Diplomacy*

ABSTRAK

Pernyataan Bersama antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping pada November 2024 memicu kontroversi, terutama karena penggunaan frasa “*joint development in areas of overlapping claims*” yang dinilai membuka ruang interpretasi merugikan bagi Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ambiguitas diplomatik dalam dokumen tersebut berdampak terhadap geopolitik dan ketahanan maritim Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap narasi resmi, dokumen kebijakan, dan literatur strategis, yang kemudian dianalisis secara tematik berdasarkan kerangka teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambiguitas diplomatik melemahkan postur pertahanan Indonesia, menciptakan ketidaksinkronan antarlembaga, dan mengikis kredibilitas Indonesia sebagai *middle power* di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, ambiguitas ini membuka peluang bagi aktor dominan seperti Tiongkok untuk mengeksploitasi celah naratif yang ada, sehingga mempersempit ruang manuver strategis Indonesia. Temuan ini menegaskan pentingnya kejelasan posisi dan konsistensi narasi dalam kebijakan luar negeri, terutama dalam isu-isu sensitif seperti Laut Natuna Utara, guna memastikan ketahanan nasional dapat dibangun secara utuh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Ambiguitas Diplomatik; Geopolitik; Ketahanan Maritim; Laut Cina Selatan; Middle Power Diplomacy.*

PENGANTAR

Sudah lebih dari satu dekade kawasan Indo-Pasifik menjadi arena rivalitas kekuatan besar, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Persaingan ini tidak hanya tercermin melalui aliansi militer dan ekspansi ekonomi, namun juga narasi diplomatik, klaim teritorial, dan dinamika kerja sama kawasan. Hal ini semakin menguat pada tahun 2017 ketika banyak negara mulai menggunakan konsep “*Indo-Pacific*” sebagai respons terhadap ekspansi Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) dan klaim sembilan garis putus (*nine-dash line*) di Laut Cina Selatan, menandai semakin jelasnya kawasan itu menjadi arena geopolitik (Medcalf, 2019; Falevi & Pasha, 2024). Di tengah konstelasi tersebut, Indonesia berada pada posisi geografis dan diplomatik yang strategis sekaligus rentan. Kenyataan ini menuntut Indonesia untuk bisa memiliki strategi geopolitik yang adaptif agar kedaulatan dan kepentingan nasionalnya tetap terjaga. Sesuai dengan perkataan Cohen (2015) bahwa negara perlu memiliki kontrol spasial dan konsistensi strategi dalam geopolitik global.

Secara geografis, Indonesia merupakan titik tumpu bagi berbagai aktor negara maupun non-negara yang memiliki kepentingan terhadap jalur laut strategis serta eksploitasi sumber daya maritim. Amerika Serikat dan Tiongkok, khususnya, membutuhkan jaminan akses terhadap rute-rute penting seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok—jantung rute perdagangan global yang menjadikan Indonesia pengontrol strategis di kawasan (Richardson, 2020). Secara diplomatik, Indonesia dikenal sebagai aktor kunci ASEAN yang sering kali diandalkan sebagai *middle power* yang memiliki kapasitas untuk memainkan peran penengah dalam kawasan (Putra dkk., 2024).

Sayangnya, peran strategis tersebut belum diimbangi dengan penguatan kapasitas institusional di bidang maritim. Kelemahan koordinasi antara Bakamla, TNI AL, dan Kementerian Luar Negeri menunjukkan lemahnya sinergi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri yang terintegrasi dengan strategi pertahanan. Indonesia sebenarnya menghadapi tantangan berupa lemahnya koordinasi antar lembaga pertahanan dan diplomasi, serta narasi kebijakan luar negeri yang tidak konsisten (Laksmiana, 2021; Chairil, 2023; Darmawan, 2025). Selain itu, dalam konteks pemerintahan baru, arah kebijakan luar negeri Indonesia juga menunjukkan perubahan signifikan. Martinus (2025) mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia cenderung menjauh dari pendekatan tradisional berbasis prinsip-prinsip hukum internasional yang diasosiasikan dengan Barat, dan mendekat ke poros alternatif seperti Tiongkok dan BRICS. Pergeseran ini dapat membantu menjelaskan meningkatnya penggunaan bahasa diplomatik yang lebih fleksibel, namun berisiko ambigu, terutama dalam isu-isu sensitif seperti Laut Natuna Utara.

Situasi ini akhirnya menjadi sorotan saat Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping mengeluarkan Pernyataan Bersama pada November 2024 yang menguraikan kerja sama di berbagai bidang, termasuk di bidang maritim. Dalam pernyataan tersebut, terdapat frasa “*joint development in areas of overlapping claims*” yang menimbulkan polemik karena selama ini Indonesia tidak pernah mengakui adanya klaim tumpang tindih dengan Tiongkok, terutama di Laut Natuna Utara (Supriyanto, 2024). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kemudian mengklarifikasi bahwa posisi Indonesia tetap

merujuk pada UNCLOS, dan frasa tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan. Namun, penggunaan frasa ambigu dalam dokumen resmi negara dapat membuka ruang interpretasi yang berpotensi dimanfaatkan Tiongkok untuk membentuk narasi strategis yang merugikan kepentingan Indonesia (Strangio, 2024; Storey, 2024).

Ambiguitas diplomatiK merupakan fenomena yang dikenal dalam kajian hubungan internasional dan geopolitik. Strategi ini sering digunakan untuk menjaga fleksibilitas atau menghindari eskalasi konflik (Scott, 2001; Pehar, 2005). Namun, bagi negara dengan posisi geopolitik yang rumit seperti Indonesia, ambiguitas pada isu maritim bisa menimbulkan konsekuensi strategis yang serius. Ketidakjelasan posisi diplomatiK dapat melemahkan *deterrence*, menimbulkan kebingungan dalam implementasi kebijakan pertahanan, serta menurunkan kepercayaan negara-negara di kawasan terhadap konsistensi Indonesia dalam menegakkan hukum laut internasional. Lebih jauh, ambiguitas diplomatiK juga dapat mengancam ketahanan nasional dari dalam. Ketika sebuah narasi diplomasi tidak selaras dengan strategi militer atau implementasi kebijakan suatu negara, maka akan muncul disonansi antar lembaga yang bisa menghambat koordinasi dan memperlemah respons negara terhadap situasi krisis.

Dalam perspektif sekuritisasi (Buzan & Wæver, 2003), narasi ancaman yang tidak jelas akan menyulitkan mobilisasi dukungan publik dan menciptakan ambiguitas institusional dalam merespons tekanan eksternal. Oleh karena itu, ketahanan nasional, khususnya dalam aspek pertahanan dan keamanan, tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kejelasan posisi negara,

konsistensi narasi, dan kekuatan institusi dalam merespons tekanan global. Meskipun diskursus mengenai ketegangan Indonesia-Tiongkok di Laut Natuna telah banyak dibahas, kajian yang secara khusus menelaah dampak dari ambiguitas diplomatiK dalam kerangka geopolitik masih terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut, dengan menekankan bagaimana ambiguitas naratif dalam kebijakan luar negeri dapat melemahkan ketahanan maritim Indonesia.

Berangkat dari dinamika tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, munculnya frasa "*joint development in areas of overlapping claims*" dalam Pernyataan Bersama Prabowo-Xi Jinping menimbulkan ambiguitas posisi Indonesia terkait klaim Tiongkok di Laut Natuna Utara. Padahal, selama ini Indonesia secara konsisten menolak keberadaan klaim tumpang tindih di wilayah tersebut. Kedua, respons institusional terhadap isu ini cenderung terfragmentasi. Kementerian Luar Negeri, TNI AL, dan Bakamla belum menunjukkan koordinasi solid, sementara kehadiran negara di tingkat lokal, khususnya bagi komunitas pesisir Natuna, masih lemah. Ketiga, meskipun beberapa kajian telah menyoroti dimensi politik dan hukum dari Pernyataan Bersama tersebut, kajian yang secara eksplisit menganalisis dampak strategis dari ambiguitas diplomatiK terhadap ketahanan maritim Indonesia secara holistik—baik dari sisi narasi, kelembagaan, maupun kapabilitas ketahanan nasional—masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menutup *gap* tersebut dengan dua pertanyaan utama: (1) bagaimana ambiguitas diplomatiK dalam Pernyataan Bersama Prabowo-Xi Jinping mencerminkan dinamika geopolitik Indonesia di kawasan Indo-Pasifik; dan (2) apa saja

implikasi dari ambiguitas diplomatik tersebut terhadap ketahanan maritim Indonesia.

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual dari Saul Cohen (2015) dan Jakob Grygiel (2006) untuk memahami dinamika geopolitik dan strategi respons Indonesia. Cohen (2015) menekankan pentingnya kontrol spasial, yaitu bagaimana suatu negara menjaga wilayah strategisnya, baik secara fisik maupun simbolik, melalui keterpaduan kebijakan lintas sektor seperti diplomasi, militer, dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, kontrol spasial ini sangat penting, mengingat posisi geografisnya di Indo-Pasifik yang strategis namun juga rawan. Ketika frasa ambigu seperti *"overlapping claims"* muncul dalam dokumen resmi, hal ini menunjukkan inkonsistensi dalam menjaga ruang strategis nasional: Indonesia menolak klaim secara formal, tapi justru secara simbolik membuka ruang kompromi yang melemahkan posisi nasional.

Sementara itu, Grygiel (2006) membedakan antara geografi, geopolitik, dan geostrategi, serta menekankan bahwa respons kebijakan harus sejalan dengan kondisi objektif wilayah dan tidak semata-mata reaktif. Munculnya narasi yang ambigu oleh Pemerintah Indonesia mengindikasikan belum adanya strategi geostrategi yang solid. Artinya, kebijakan luar negeri dan pertahanan belum sepenuhnya terkoordinasi dalam menghadapi tekanan dari kekuatan besar seperti Tiongkok. Hal ini memperkuat asumsi bahwa Indonesia masih kekurangan jangkar strategis jangka panjang. Padahal, di tengah kompetisi kawasan yang semakin intens, posisi sebagai negara maritim seharusnya mendorong lahirnya strategi yang lebih terarah dan menyeluruh.

Kerangka di atas juga diperkuat oleh teori sekuritisasi Buzan & Wæver (2003)

yang menyoroti pentingnya narasi dalam membentuk persepsi ancaman. Teori ini menegaskan bahwa isu keamanan tidak semata-mata lahir dari kondisi objektif, tetapi juga dibentuk melalui narasi yang menjadikan suatu persoalan dianggap sebagai ancaman eksistensial. Dalam perspektif ini, kejelasan narasi menjadi kunci agar negara dapat membangun legitimasi untuk mengambil langkah luar biasa, misalnya mobilisasi militer atau penyesuaian kebijakan strategis. Namun ketika diplomasi Indonesia gagal menyampaikan posisi yang tegas dalam isu-isu maritim sensitif seperti Laut Natuna Utara, proses sekuritisasi menjadi terhambat. Negara pun kesulitan membangun konsensus nasional maupun memperoleh dukungan publik yang kuat dalam merespons tekanan eksternal secara terkoordinasi dan efektif.

Penelitian ini juga menggunakan kerangka pemikiran Pehar (2005) dan Scott (2001) mengenai ambiguitas diplomatik. Keduanya menunjukkan bahwa strategi ini dapat digunakan negara kuat untuk menyisipkan ruang interpretasi yang menguntungkan mereka secara sepihak. Bagi Indonesia, yang memiliki posisi tawar terbatas terhadap Tiongkok, strategi ini bisa menjadi alat dominasi jika tidak dibarengi dengan kekuatan struktural dan komunikasi strategis yang kuat. Dengan demikian, konsistensi antara narasi diplomatik, strategi pertahanan, dan peta wilayah harus dijaga demi menjamin *survival* negara-bangsa di tengah kompetisi Indo-Pasifik yang semakin intens.

Pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan digunakan karena permasalahan yang dikaji—ambiguitas diplomatik dalam dokumen resmi negara dan dampaknya terhadap ketahanan maritim—bersifat konseptual dan memerlukan analisis

mendalam terhadap narasi, dokumen, dan wacana strategis. Sumber data diperoleh dari publikasi akademik yang relevan, termasuk artikel ilmiah dari jurnal bereputasi nasional dan internasional, laporan lembaga kajian strategis (seperti CSIS, RSIS, FPRI), serta pernyataan resmi pemerintah dan pemberitaan media kredibel. Pemilihan sumber dilakukan secara *purposive* berdasarkan relevansi substansi dan otoritas penerbit.

Analisis dilakukan secara tematik dengan mengkaji narasi utama yang muncul dalam dokumen dan literatur yang dianalisis. Tahapan analisis mencakup: (1) identifikasi istilah kunci dan ekspresi diplomatiK yang muncul dalam dokumen resmi dan literatur strategis (seperti *overlapping claims*, *diplomatic ambiguity*, dan istilah lain terkait sengketa maritim); (2) kategorisasi tematik berdasarkan isu strategis (narasi, postur pertahanan, kelembagaan); dan (3) interpretasi konseptual dengan merujuk pada teori geopolitik Cohen (2015), kerangka geostrategi Grygiel (2006), serta teori sekuritisasi dari Buzan & Wæver (2003). Ketiganya digunakan untuk menilai keterkaitan antara ambiguitas diplomatiK, strategi pertahanan, dan resiliensi negara dalam menghadapi tekanan eksternal di kawasan Indo-Pasifik.

Dengan menggunakan studi pustaka sebagai metode utama, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara empiris, melainkan untuk memberikan pemahaman konseptual dan interpretatif mengenai bagaimana ambiguitas diplomatiK memengaruhi ketahanan maritim Indonesia. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam merumuskan strategi yang lebih koheren dan tahan terhadap dinamika kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks.

PEMBAHASAN

Ambiguitas DiplomatiK dan Dinamika Geopolitik Indonesia

Pernyataan Bersama yang dirilis oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping pada November 2024 telah menarik perhatian publik sekaligus menuai kritik. Terdapat salah satu bagian yang dianggap kontroversial yaitu frasa “*joint development in areas of overlapping claims*.” Hal ini terjadi karena secara hukum, Indonesia tidak pernah mengakui adanya klaim tumpang tindih dengan Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara (Supriyanto, 2024). Dalam konteks geopolitik, penggunaan bahasa ambigu dalam dokumen resmi seperti ini bukan sekedar soal pilihan kata, tetapi bentuk strategi komunikasi yang sering muncul dalam relasi kekuasaan asimetris (Scott, 2001; Pehar, 2005). Ambiguitas semacam ini menunjukkan betapa sulitnya posisi Indonesia, di satu sisi ingin menjaga hubungan baik dengan dua kekuatan besar yang bersaing, tapi di sisi lain tetap harus menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional.

Cohen (2015) menjelaskan bahwa kekuatan geopolitik suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga mencakup kapasitas spasial, ekonomi, ideologis, dan tata kelola. Dalam kerangka ini, frasa “*overlapping claims*” menyentuh langsung pada dimensi kontrol spasial, yaitu bagaimana negara menegaskan kehadiran dan kedaulatannya atas wilayah yang dianggap strategis. Ketika Indonesia gagal menunjukkan sikap diplomatiK yang tegas, kapasitas untuk mencegah atau menahan klaim sepihak dari Tiongkok akan melemah. Ambiguitas yang muncul dalam dokumen resmi tersebut dapat memberikan ruang bagi Tiongkok untuk membangun narasi bahwa Indonesia

secara implisit mengakui adanya “klaim bersama,” meskipun secara hukum posisi Indonesia tetap merujuk pada prinsip-prinsip UNCLOS (Supriyanto, 2024). Pandangan serupa disampaikan oleh Basundoro (2025) yang menilai bahwa penggunaan frasa tersebut dalam dokumen resmi Indonesia-Tiongkok berpotensi melemahkan konsistensi posisi Indonesia terhadap prinsip UNCLOS. Bahkan, menurutnya, penggunaan istilah “*joint development*” dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai bentuk legitimasi terhadap klaim historis Tiongkok yang selama ini ditolak secara prinsipil oleh Indonesia. Dalam jangka panjang, seperti yang ditegaskan oleh Grygiel (2006), keberhasilan strategi geopolitik ditentukan oleh sejauh mana kebijakan jangka pendek negara tersebut mampu sejalan dengan realitas geopolitik yang lebih luas. Diplomasi kompromistis Indonesia memang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas hubungan bilateral. Namun, tanpa diimbangi dengan pembacaan strategis terhadap pola ekspansi pengaruh Tiongkok, strategi tersebut berisiko menciptakan kebingungan strategis. Kehati-hatian jangka pendek justru berpotensi merugikan kepentingan jangka panjang, terutama dalam hal mempertahankan klaim dan kedaulatan maritim.

Ambiguitas ini juga memunculkan pertanyaan lebih lanjut mengenai konsistensi Indonesia sebagai negara *middle power*

maritim. Dalam teori diplomasi *middle power*, Andrew F. Cooper (1997) menekankan bahwa pengaruh negara-negara menengah tidak dibangun melalui dominasi militer, melainkan melalui konsistensi normatif, diplomasi *niche* strategis, serta kredibilitas dalam kerja sama multilateral. Dalam konteks Laut Cina Selatan, beberapa negara di kawasan menunjukkan pendekatan yang lebih tegas dan konsisten. Filipina, misalnya, secara eksplisit terus menolak klaim sepihak Tiongkok, dengan merujuk pada putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) tahun 2016 sebagai dasar hukum, bahkan ketika pemerintahannya cenderung mendekat secara ekonomi ke Tiongkok (Candice & Perwita, 2021). Sementara itu, Vietnam memperkuat posisinya melalui patroli militer rutin serta penguatan aliansi dengan Amerika Serikat dan Jepang (Thayer, 2016).

Dibandingkan dengan kedua negara tersebut, pendekatan Indonesia terlihat lebih hati-hati dan sering kali ambigu, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang inkonsistensi posisi diplomatik, terutama dalam mempertahankan norma-norma hukum laut internasional yang selama ini menjadi landasan kebijakan maritim Indonesia. Strangio (2024) mencatat bahwa bahasa yang digunakan dalam Pernyataan Bersama menunjukkan kecenderungan Indonesia mulai mengaburkan posisi netralnya,

Tabel 1. Perbandingan Respons Diplomati ASEAN terhadap Klaim Maritim Tiongkok

Negara	Posisi terhadap Klaim Tiongkok	Instrumen Hukum/ Politik	Sikap terhadap UNCLOS	Implikasi terhadap Solidaritas Kawasan
Filipina	Menolak tegas	PCA 2016, Koalisi dengan AS	Sangat mendukung	Mendorong respons kolektif
Vietnam	Menolak aktif	Armada militer, diplomasi keras	Sangat mendukung	Meningkatkan ketegangan diplomatik
Malaysia	Moderat - ambivalen	Nota diplomatik, klaim hukum	Mendukung	Cenderung netral
Indonesia	Ambigu	Pernyataan Bersama 2024, nota verbal	Mendukung, tapi tidak konfrontatif	Berisiko melemahkan solidaritas ASEAN

Sumber: Olahan Peneliti, 2025.

sedangkan Storey (2024) memperingatkan bahwa ambiguitas semacam ini berpotensi merusak solidaritas ASEAN dalam merespons ekspansi maritim Tiongkok. Artinya, dampak dari ambiguitas diplomatik ini tidak hanya terbatas pada hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok, tetapi juga berdampak pada persepsi kawasan terhadap posisi Indonesia dalam lanskap diplomasi yang lebih luas. Indonesia mungkin lupa bahwa sebagai negara yang selalu memosisikan dirinya sebagai penyeimbang netral di kawasan, terdapat risiko kehilangan daya tarik diplomatiknya jika ia tidak mengambil sikap tegas terhadap isu-isu strategis seperti Laut Cina Selatan. Dalam konteks geopolitik, kejelasan posisi dan narasi bukan hanya tentang pencitraan, tetapi bagian penting dalam membangun legitimasi regional sekaligus memperkuat potensi pembentukan aliansi strategis (Cooper, 1997).

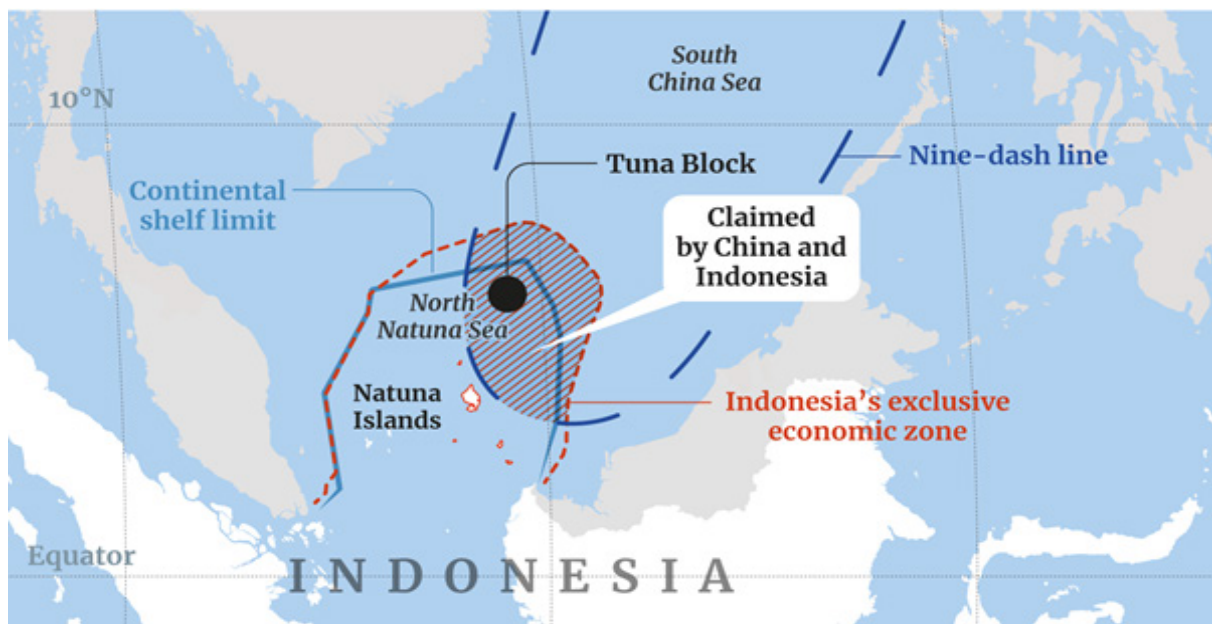
Dengan demikian, penggunaan frasa ambigu dalam Pernyataan Bersama Prabowo-Xi Jinping mencerminkan setidaknya tiga dinamika utama dalam geopolitik Indonesia. Pertama, dinamika narasi dan kontrol spasial, di mana ketidakjelasan komunikasi diplomatik berkontribusi pada melemahnya posisi geografis dan kapasitas *deterrence* Indonesia (Cohen, 2015). Kedua, dinamika sebagai *middle power*, yang menempatkan Indonesia dalam tekanan untuk menyeimbangkan hubungan dengan Tiongkok tanpa mengorbankan solidaritas kawasan (Cooper, 1997; Storey, 2024). Ketiga, ketimpangan antara diplomasi dan kapasitas pertahanan, dengan strategi kompromistis yang tidak diiringi dengan kekuatan struktural yang memadai untuk menjaga kepentingan nasional (Grygiel, 2006). Dalam konteks geopolitik, kekuatan nasional tidak hanya diukur dari kemampuan

tempur, tetapi juga dari keteguhan narasi, kejelasan posisi, serta kohesi antara strategi diplomatik dan kapasitas struktural negara. Ambiguitas yang tidak dikelola dengan cermat justru membuka ruang lebih besar bagi aktor dominan untuk mengeksploitasi celah yang ada dalam kontestasi geopolitik kawasan.

Dampak Ambiguitas DiplomatiK terhadap Ketahanan Maritim

Ambiguitas diplomatik tidak hanya menimbulkan dampak simbolik, tetapi juga membawa implikasi langsung terhadap ketahanan nasional, khususnya pada domain maritim. Ketika frasa seperti "*overlapping claims*" muncul dalam dokumen resmi tanpa penjelasan yang memadai, institusi seperti Bakamla dan TNI AL berpotensi menghadapi kebingungan operasional, seperti wilayah mana yang perlu dipatroli, sejauh mana yurisdiksi dapat ditegakkan, dan dalam batas apa tindakan tegas dapat dibenarkan secara hukum. Kesenjangan naratif ini terlihat jelas dalam perbedaan versi dokumen Pernyataan Bersama Prabowo-Xi Jinping. Versi bahasa Mandarin secara eksplisit mencantumkan frasa "*waters claimed by both countries*," sementara versi bahasa Inggris hanya menyebut "*overlapping claims*" tanpa penjelasan lebih lanjut (Supriyanto, 2024). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa Tiongkok memanfaatkan ambiguitas diplomatik untuk membangun narasi, baik di tingkat domestik maupun internasional, yang memberi kesan seolah-olah Indonesia mengakui klaim maritimnya.

Pada peta di atas, terlihat secara visual area Laut Natuna Utara yang menjadi sumber polemik dalam frasa "*overlapping claims*" pada Pernyataan Bersama Prabowo-Xi Jinping bulan November 2024 lalu. Wilayah yang diarsir merupakan area Zona Ekonomi



Gambar 1. Peta wilayah Laut Natuna Utara memperlihatkan zona tumpang tindih antara klaim *nine-dash line* Tiongkok dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Sumber: Siregar, 2023.

Eksklusif (ZEE) Indonesia, tetapi di saat yang bersamaan wilayah tersebut juga termasuk dalam cakupan sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*) yang diklaim secara sepihak oleh Tiongkok. Keberadaan *Tuna Block*—kawasan eksplorasi minyak dan gas yang dioperasikan oleh Harbour Energy dalam ZEE Indonesia—semakin memperjelas bahwa sengketa ini bukan hanya simbolik, tetapi juga menyangkut kontrol atas sumber daya strategis (Moore, 2022; RFA, 2023). Dalam konteks ini, penggunaan bahasa diplomatik yang ambigu memberi ruang bagi Tiongkok untuk membangun narasi yang menyatakan seolah-ada ada pengakuan bersama atas wilayah sengketa tersebut. Jika dibiarkan tanpa klarifikasi yang tegas, situasi ini tidak hanya akan melemahkan posisi hukum Indonesia di bawah UNCLOS, namun juga mengganggu kohesi antarlembaga dalam merespons dinamika keamanan kawasan secara terpadu dan konsisten. Karena dalam kawasan rawan seperti Laut Natuna Utara,

dibutuhkan kejelasan sikap dan posisi untuk menjaga kewaspadaan serta memungkinkan respons yang cepat dan sah secara hukum (Supriyanto, 2024).

Permasalahan operasional ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia yang cenderung sentralistik. Laksmana (2025) menyoroti bahwa lemahnya posisi diplomatik Indonesia dalam perundingan tersebut juga mencerminkan berkurangnya daya tawar institusi seperti Kementerian Luar Negeri. Ketika visi pribadi presiden dan kepentingan ekonomi elite lebih dominan, keseimbangan dalam perumusan kebijakan luar negeri menjadi terganggu. Ketidakseimbangan ini bukan hanya persoalan tata kelola, tetapi juga bisa berdampak langsung pada melemahnya ketahanan maritim Indonesia dalam jangka panjang.

Cohen (2015) menegaskan bahwa kekuatan geopolitik suatu negara tidak hanya ditentukan oleh keunggulan militer atau

penguasaan wilayah semata, tetapi juga oleh integrasi antara kapabilitas militer, kekuatan ekonomi, ideologi yang kohesif, dan tata kelola yang efektif. Ketika sektor diplomasi dan pertahanan tidak memiliki pemahaman yang selaras terhadap batas wilayah maupun jenis ancaman yang dihadapi, maka akan ada risiko fragmentasi strategi nasional. Ketidakselarasan antara tindakan di lapangan dan narasi pada level internasional akan berdampak langsung pada melemahnya postur *deterrence* Indonesia dalam menghadapi proyeksi kekuatan dari aktor besar seperti Tiongkok.

Dalam pandangan Grygiel (2006), penggunaan bahasa yang ambigu dalam kebijakan luar negeri mencerminkan ketidaksesuaian antara geostrategi nasional dan realitas geopolitik kawasan. Di satu sisi, Indonesia berusaha mempertahankan stabilitas hubungan dengan Tiongkok demi menjaga perdamaian dan kerja sama ekonomi di kawasan. Namun di sisi lain, tekanan geopolitik terus meningkat seiring dengan semakin agresifnya klaim maritim Tiongkok, baik di Laut Cina Selatan maupun perairan Natuna. Jika strategi diplomatiK Indonesia tidak didasarkan pada pembacaan jangka panjang terhadap dinamika geopolitik ini, ruang gerak strategis Indonesia akan semakin sempit dan posisinya sebagai kekuatan maritim regional pun ikut melemah.

Selain itu, kondisi flotila TNI AL mencerminkan masalah struktural yang serius. Menurut Basundoro (2024), sekitar 40 % kapal laut Indonesia berusia lebih dari 30 tahun, sementara armada *ocean-going* sangat terbatas pada 7 fregat dan 7 korvet—jumlah yang tak ideal untuk menghadapi tantangan di ZEE seluas 2,8 juta km². Penelitian lain juga menekankan bahwa proses modernisasi armada Indonesia masih berjalan lambat.

Meskipun dukungan politik dan alokasi anggaran sudah ada, kemajuan di lapangan tetap terseok-seok. Dalam banyak kasus, kapal-kapal tua masih menjadi andalan karena program peremajaan belum benar-benar terealisasi secara menyeluruh (Chang, 2021). Penelitian Al-Fadhat & Effendi (2019) tentang proyek kapal selam DSME 209/1400 juga menunjukkan bahwa meskipun Indonesia terus mendorong kerja sama luar negeri, proses transfer teknologi dan kesiapan industri pertahanan dalam negeri masih jauh dari ideal. Temuan ini memperkuat gambaran bahwa tantangan dalam modernisasi armada tidak hanya bersifat material, tetapi juga tentang persoalan kelembagaan dan sistemik yang lebih dalam. Dalam konteks ini, diplomasi yang ambigu tidak hanya melemahkan legitimasi naratif, tetapi juga memperdalam berbagai *bottleneck* struktural karena armada yang tidak cukup *robust* untuk mendukung strategi pertahanan maritim.

Pengalaman Indonesia dalam menangani sengketa maritim di Blok Ambalat memberi pelajaran penting bahwa ketegangan di wilayah strategis tidak bisa diselesaikan hanya lewat pendekatan militer atau diplomasi simbolik. Hadi (2023) berargumen bahwa strategi pertahanan di wilayah sengketa seperti Ambalat memerlukan sinergi nyata antara aktor diplomasi, militer, dan sektor keamanan nontradisional—termasuk penguatan anggaran serta sistem pengawasan yang terintegrasi lintas matra. Dalam konteks Laut Natuna Utara, kasus Ambalat bisa menjadi cermin bahwa tanpa koordinasi kelembagaan yang solid dan kepemimpinan strategis yang tegas, sikap diplomatiK yang ambigu justru membuka celah yang bisa dimanfaatkan oleh aktor asing dan memperbesar kerentanan maritim Indonesia.

Selain memperkuat narasi Tiongkok di kawasan, ketidakjelasan posisi Indonesia dalam isu klaim tumpang tindih ini juga menciptakan ketakutan dan ketidakpastian bagi masyarakat pesisir yang selama ini mengandalkan laut sebagai sumber penghidupan utama mereka, terutama nelayan Natuna (Basundoro, 2025; Fajriansyah 2025). Dilansir dari laman Kompas, Dedi, seorang nelayan tradisional dari Desa Batu Hitam, Kabupaten Natuna menyebut bahwa perairan dekat daratan kini dipenuhi ratusan kapal asing—terutama dari Vietnam, Tiongkok, dan Malaysia—hingga terasa “seperti kota terapung.” Hal ini tentu berujung pada penurunan pendapatan nelayan lokal secara signifikan. Dedi juga menambahkan bahwa fenomena ini kembali meningkat sejak 2019, setelah era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang sebelumnya berhasil menekan aktivitas kapal asing secara signifikan (Fajriansyah, 2025). Meskipun tidak secara langsung terkait dengan Pernyataan Bersama Prabowo-Xi Jinping, lemahnya pengawasan dan narasi diplomatik yang cenderung ambigu turut memperumit upaya Indonesia dalam mempertahankan otoritas maritimnya di kawasan.

Fenomena ini tidak hanya mengancam mata pencaharian nelayan Natuna, tetapi juga memperlebar jarak antara negara dan masyarakat pesisir. Ketika negara gagal menjelaskan posisinya dengan jelas dan tidak hadir melalui perlindungan yang nyata, kepercayaan terhadap institusi pun perlahan terkikis. Dalam konteks ini, ambiguitas diplomatik bukan hanya memberi celah bagi negara pesaing untuk membangun narasinya sendiri, tetapi juga menciptakan *state-society disconnection* dalam menjaga ketahanan maritim secara bersama.

Sejalan dengan itu, Juanita & Setiani (2022) menunjukkan bahwa respons Indonesia terhadap krisis di Laut Natuna Utara masih terlalu berfokus pada pendekatan militer dan langkah-langkah simbolik, seperti pengerahan nelayan dari Pantura atau pembangunan instalasi pertahanan. Padahal, pendekatan semacam ini belum tentu menjawab kebutuhan jangka panjang. Mereka menekankan pentingnya membangun strategi yang lebih berkelanjutan dengan melibatkan nelayan lokal Natuna sebagai bagian dari pertahanan berbasis komunitas yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan Bakamla serta TNI AL. Dengan begitu, kedaulatan dan ketahanan maritim nasional bisa dijaga tidak hanya dari atas, tapi juga dari akar.

Dari perspektif sekuritisasi, kegagalan Indonesia dalam membingkai isu ini sebagai ancaman eksistensial menunjukkan lemahnya proses sekuritisasi itu sendiri. Tanpa adanya konsensus politik dan kelembagaan yang kuat, isu strategis semacam ini kerap gagal menembus agenda nasional, padahal ia memiliki implikasi langsung terhadap legitimasi dan kedaulatan wilayah Indonesia. Dalam konteks ini, narasi bukan sekadar alat komunikasi, tetapi menjadi bagian penting dalam membentuk persepsi ancaman, meraih dukungan publik, dan mengarahkan respons kebijakan secara terkoordinasi.

Teori *regional security complex* milik Buzan & Wæver (2003) juga mendukung fakta bahwa kelangsungan hidup negara dalam era kontestasi geopolitik saat ini tidak hanya ditentukan oleh kapabilitas militer, namun juga kemampuan negara tersebut untuk memosisikan dirinya secara tegas, membangun narasi keamanan yang koheren, serta memperoleh kepercayaan dari lingkungan regionalnya. Ambiguitas diplomatik memang

kerap digunakan sebagai strategi untuk meredam ketegangan jangka pendek (Scott, 2001), namun jika dibiarkan berlarut-larut, ia justru berpotensi menciptakan kerentanan sistemik. Dalam jangka panjang, ambiguitas dapat melemahkan koordinasi lintas sektor, memperparah fragmentasi kebijakan antar-lembaga, dan menggerus legitimasi serta daya saing Indonesia dalam arena diplomasi regional maupun global (Pehar, 2005). Lebih dari itu, ketidakjelasan posisi strategis akan mempersempit kapasitas negara dalam merespons tantangan keamanan secara adaptif, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang temuan dalam pembahasan sebelumnya, berikut disajikan ringkasan dampak ambiguitas diplomatik terhadap ketahanan maritim Indonesia dalam beberapa dimensi utama:

Dengan demikian, dampak ambiguitas diplomatik terhadap ketahanan nasional tidak dapat diremehkan. Implikasinya meluas ke berbagai dimensi: mulai dari arah strategi pertahanan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi antar-instansi, hingga kredibilitas Indonesia sebagai pendukung tatanan internasional berbasis hukum (Storey, 2024). Dalam konteks kelangsungan hidup negara, kejelasan posisi bukan sekadar elemen simbolik, melainkan fondasi utama bagi pembangunan strategi geopolitik yang kokoh—terutama di tengah konstelasi kekuatan Indo-Pasifik yang semakin kompetitif dan dinamis.

SIMPULAN

Pernyataan Bersama Prabowo-Xi Jinping pada November 2024 menjadi bukti bahwa ambiguitas diplomatik bukan sekadar bentuk retorika, melainkan bagian dari strategi yang dapat memengaruhi posisi Indonesia di kawasan. Frasa *“joint development in areas of overlapping claims”* menciptakan ketidakjelasan posisi negara terhadap klaim sepihak Tiongkok, sekaligus menggambarkan inkonsistensi strategi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik Indo-Pasifik. Ini menjawab permasalahan pertama bahwa ambiguitas diplomatik yang muncul telah melemahkan posisi strategis Indonesia secara hukum, simbolik, dan taktis.

Lebih jauh, ambiguitas tersebut berdampak langsung terhadap ketahanan maritim Indonesia. Minimnya koordinasi antar lembaga, lemahnya sistem pertahanan laut, dan rendahnya keterlibatan masyarakat pesisir memperparah kerentanan terhadap tekanan eksternal. Dalam konteks ini, kejelasan narasi dan arah kebijakan menjadi krusial untuk membangun sinergi antara diplomasi, pertahanan, dan institusi domestik. Hal ini menunjukkan bahwa strategi ketahanan tidak dapat dipisahkan dari konsistensi komunikasi politik luar negeri serta penguatan kelembagaan di sektor maritim.

Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana ambiguitas serupa terjadi dalam hubungan Indonesia dengan negara lain di Indo-Pasifik, serta bagaimana narasi diplomatik dibentuk, dinegosiasikan, dan diterjemahkan

Tabel 2. Dimensi Dampak Ambiguitas Diplomatik terhadap Ketahanan Maritim Indonesia

Dimensi	Dampak Langsung	Contoh Empiris
Kelembagaan	Kebingungan koordinasi antar institusi	Bakamla-TNI AL tidak sinergis
Strategi Pertahanan	Lemahnya <i>deterrence</i> dan postur defensif	Usia alutsista 30+ tahun
Sosial-Ekonomi	Ketakutan masyarakat pesisir	Penurunan penghasilan nelayan Natuna
Diplomasi Regional	Menurunnya kredibilitas normatif	Perbedaan versi dokumen

Sumber: Olahan Peneliti, 2025.

ke dalam kebijakan di tingkat lokal. Selain itu, pendalaman kajian mengenai respons masyarakat pesisir terhadap kebijakan maritim nasional juga penting dilakukan untuk memperkaya pemahaman tentang dimensi pertahanan maritim dalam kerangka ketahanan nasional yang selama ini relatif terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fadhat, F. & Effendi, N. N. A., 2019. “Kerjasama Pertahanan Indonesia-Korea Selatan: Ketahanan Maritim dan Transfer Teknologi dalam Pengadaan Kapal Selam DSME 209/1400”. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 25, No. 3, hh. 373-392. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/48822/26838>.
- Basundoro, A. F., 2024. “Challenges Faced in Indonesia’s Naval Modernisation”. *S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS)*. Tersedia di: <https://rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2024/10/CO24151.pdf> [diakses pada 9 Juli 2025].
- Basundoro, A. F., 2025. “Indonesia-China Agreement and Jakarta’s Inconsistency on the South China Sea Issue”. *S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS)*. Tersedia di: <https://rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2025/01/CO25003.pdf> [diakses pada 9 Juli 2025].
- Buzan, B. & Wæver, O., 2003. *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Candice, J. J. & Perwita, A. A., 2021. “The Shift and Continuity of the Philippines’ Foreign Policy under Rodrigo Duterte on the South China Sea Issue”. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 6, No. 1. <https://doi.org/10.36859/jdg.v6i01.396>.
- Chairil, T., 2023. “Assessing Indonesia’s Maritime Governance: Capacity, Priorities and Challenges”. *Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI)*. Tersedia di: <https://amti.csis.org/assessing-indonesias-maritime-governance-capacity-priorities-and-challenges/> [diakses pada 9 Juli 2025].
- Chang, F. K., 2021. “At a Crossroads: Indonesia’s Navy Modernization”. *Foreign Policy Research Institute*. Tersedia di: <https://www.fpri.org/article/2021/09/at-a-crossroads-indonesias-navy-modernization/> [diakses pada 8 Juli 2025].
- Cohen, S. B., 2015. *Geopolitics: The Geography of International Relations*. Edisi ketiga. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Cooper, A. F., 1997. *Niche Diplomacy: Middle Powers after the Cold War*. London: Palgrave Macmillan.
- Darmawan, A. R., 2025. “Navigating Uncertainty: Why Indonesia Needs a National Maritime Strategy”. *The Diplomat*. Tersedia di: <https://thediplomat.com/2025/03/navigating-uncertainty-why-indonesia-needs-a-national-maritime-strategy/> [diakses pada 9 Juli 2025].
- Fajriansyah, A., 2025. “Foreign Fishing Vessels Invade North Natuna Sea, Local Fishermen Suffer”. *Kompas*(online). Tersedia di: <https://www.kompas.id/artikel/en-kapal-ikan-asing-serbu-laut-natuna-utara-nelayan-lokal-sengsara> [diakses pada 13 Juli 2025].
- Falevi, M. R. & Pasha, J. A., 2024. “Sino-US Competition Dynamics in Southeast Asia: A Case Study of the Belt and Road Initiative and Free and Open Indo-Pacific”. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 9, No. 3, hh. 226-242. <https://doi.org/10.15294/jpi.v9i3.5385>.

- Hadi, Y. S., 2023. "Implementasi Roadmap Pengamanan Wilayah Perbatasan dalam Menghadapi Klaim Malaysia dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Perbatasan Ambalat)". *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 29, No. 3, hh. 334-345. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/88030/38382>.
- Juanita, M. D. & Setiani, M. F., 2022. "Fishermen Empowerment Strategy as a Solution in the Security Management Crisis in the North Natuna Sea". *Journal of Maritime Studies and National Integration*, Vol. 5, No. 2, hh. 93-100. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jmsni/article/view/13450>.
- Laksmiana, E. A., 2021. "Stuck in Second Gear? Indonesia's Strategic Dilemma in the Indo-Pacific". *ISEAS-Yusof Ishak Institute*. Tersedia di: <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-170-stuck-in-second-gear-indonesias-strategic-dilemma-in-the-indo-pacific-by-evan-a-laksmiana/> [diakses pada 10 Juli 2025].
- Laksmiana, E. A., 2025. "Is Indonesia Sleepwalking into Strategic Alignment with China?". *Survival*, Vol. 67, No. 1, hh. 61-67. <https://doi.org/10.1080/00396338.2025.2459017>.
- Martinus, M., 2025. "Indonesia's Probable Foreign Policy Shift from the West under a Prabowo Administration". *ISEAS-Yusof Ishak Institute*. Tersedia di: <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2025-12-indonesias-probable-foreign-policy-shift-from-the-west-under-a-prabowo-administration-by-melinda-martinus/> [diakses pada 10 Juli 2025].
- Medcalf, R., 2019. "Mapping a Multipolar Future: The Contest for the Indo-Pacific". *Global Asia: a Journal of the East Asia Foundation*, Vol. 14, No. 4, hh. 58-69.
- Moore, J., 2022. "Oil and Gas in the Capitals: China is Now Threatening Indonesian E&P". *World Oil*. Tersedia di: <https://www.worldoil.com/magazine/2022/june-2022/columns/oil-and-gas-in-the-capitals-china-is-now-threatening-indonesian-e-p> [diakses pada 10 Juli 2025].
- Pehar, D., 2005. "Diplomatic Ambiguity: From the Power-Centric Practice to a Reasoned Theory". *Polemos: Journal of Interdisciplinary Research on War and Peace*, Vol. 8, No. 15-16, hh. 153-182. <https://hrcak.srce.hr/en/clanak/7735>.
- Putra, B. A., Cangara, A. R., & Darwis, 2024. "Middle Power Norm Entrepreneur: Indonesia's Advocacy of the ASEAN Indo-Pacific Outlook". *SAGE Open*, Vol. 14, No. 4. <https://doi.org/10.1177/21582440241302149>.
- Radio Free Asia (RFA), 2023. "China's Coast Guard Patrols Site of Indonesian Gas Field". Tersedia di: <https://www.rfa.org/english/news/china/china-patrols-indonesian-gas-field-01052023030518.html> [diakses pada 13 Juli 2025].
- Richardson, K., 2020. "Indonesia: Lessons for the US-China Geo-economic Competition". *Air University*. Tersedia di: <https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/2425678/indonesia-lessons-for-the-uschina-geo-economic-competition/> [diakses pada 10 Juli 2025].
- Scott, N., 2001. "Ambiguity versus Precision: The Changing Role of Terminology in Conference Diplomacy". Dalam Kurbalija, J., & Slavik, H. (Ed.), *Language and Diplomacy*, hh. 153-162. Malta: DiploFoundation.
- Siregar, K., 2023. "In Focus: What the Remote Natuna Islands Reveal about

- Indonesia's Stance on China". *Channel News Asia*. Tersedia di: <https://www.channelnewsasia.com/asia/indonesia-china-natuna-islands-tensions-south-china-sea-geopolitics-3676876> [diakses pada 12 Juli 2025].
- Storey, I., 2024. "Prabowo's Overtures to China and Ramifications on the South China Sea Dispute". *Fulcrum*. Tersedia di: <https://fulcrum.sg/prabowos-overtures-to-china-and-ramifications-on-the-south-china-sea-dispute/> [diakses pada 20 Juni 2025].
- Strangio, S., 2024. "Did Indonesia just Capitulate to China on the South China Sea?" *The Diplomat*. Tersedia di: <https://thediplomat.com/2024/11/did-indonesia-just-capitulate-to-china-on-the-south-china-sea/> [diakses pada 18 Juni 2025].
- Supriyanto, R.A., 2024. "Check, not checkmate: Indonesia's nine-dash line mistake". *The Interpreter*. Tersedia di: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/check-not-check-mate-indonesia-s-nine-dash-line-mistake> [diakses pada 20 Juni 2025].
- Thayer, C. A., 2016. "Vietnam's Strategy of 'Cooperating and Struggling' with China over Maritime Disputes in the South China Sea". *Journal of Asian Security and International Affairs*, Vol. 3, No. 2, hh. 200-220. <https://doi.org/10.1177/2347797016645453>